



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PARULIAN SANDY NOVERIA
2. Jabatan : DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN
3. NHK : 668056

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	6.981.260.000
1. Tanah Seluas 1.056 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI		
Rp. 105.000.000		
2. Tanah Seluas 1.459 m2 di KAB / KOTA SAMOSIR, HASIL SENDIRI		
Rp. 25.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA PEMATANG SIANTAR , Rp. 851.260.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 6.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	700.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
2. MOBIL, HONDA HONDAHRVRU115ECVTCRD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000		
3. MOBIL, WULING CLOUD Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	106.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.693.096.374
F. HARTA LAINNYA	Rp.	25.000.000
Sub Total	Rp.	15.505.356.374



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 15.505.356.374

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.